

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENYEBAR KEBENCIAN DI  
JEJARING SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN FAREZA**

**NPM : 1521020282**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENYEBAR KEBENCIAN DI  
JEJARING SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN FAREZA**

**NPM : 1521020282**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)**

Pembimbing I : Dr. KH. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

UU ITE terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Namun, UU ITE ini justru mengancam dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pasalnya jika ada seseorang yang merasa tersinggung dengan tulisan atau kicauan di dunia maya, dengan mudah dia menggunakan pasal ini untuk menjerat si pembuatnya. Sekedar curhat, keluhan, atau kritik bisa dengan mudah diseret ke ranah pidana. Tak jarang, undang undang ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Hal ini terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun politik. UU ITE semestinya digunakan untuk melindungi publik, namun yang terjadi malah sebaliknya, ia menjadi alat melawan publik.

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimana penyebar kebencian di jejaring sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah mengkaji bagaimana jalannya proses Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) dan meninjau pandangan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial.

Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan penyebar kebencian. Serta dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa penyebar kebencian di Jejaring Sosial Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) adalah menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, penghinaan/pencemaran nama baik, serta menyebarkan berita bohong/hoax. Dalam kasus diatas pelaku kejahatan bisa di jerat maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring sosial adalah jika Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) ini dapat menimbulkan dosa dan pelanggaran maka pelaku dapat menerima hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suramin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

**Nama : Muhammad Rizki Kurniawan Fareza**

**NPM : 152102082**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP  
PENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING  
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19  
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. KH. Mohammad Rusli, M.Ag.**

**H. Rohmat S. Ag. M.H.I.**

**NIP.195902151986031004**

**NIP.197409202003121003**

**Ketua Jurusan Siyasah**

**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**NIP.197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH  
TERHADAPPENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING  
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**, disusun Oleh Nama: Muhammad Rizki  
Kurniawan Fareza NPM: 1521020282, Program Studi: Siyasa  
Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping I: Dr.KH. Mohammad Rusli, M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping II : H.Rohmat, S.Ag. M.H.I. (.....)

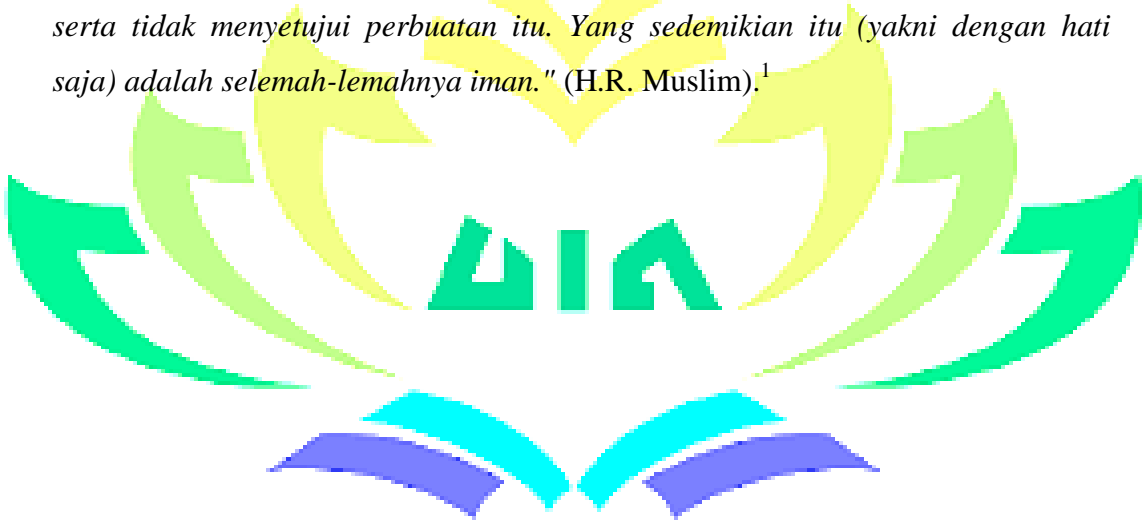
**Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khoiruddin, M.H.**  
NIP.1962102199930311002

## MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص . يَقُولُ ( : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ أَلَاءٍ يُمَانٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Said Al-Khudri R.A berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW\ bersabda: "*Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya (dengan kekuasaannya), jikalau tidak dapat dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya (dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi) dan jikalau tidak dapat juga dengan lisannya, maka dengan hatinya (maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu (yakni dengan hati saja) adalah selemah-lemahnya iman.*" (H.R. Muslim).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam, h. 81.

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku ayahanda Zalikin dan Ibu Elfa Diana yang telah tulus Ikhlas membesarkan, membiayai, serta mendoakanku hingga aku dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidupku, semoga Allah selalu melindungimu dimanapun berada.
2. Kakakku Lina Fitri Yani dan adikku Stephanie Aurelia Zaliyanti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan demi keberhasillanku.
3. Sahabat-sahabatku Iduy, Bimok, Guntur, Wahyu, Nourel yang selalu menemani dalam suka maupun duka, serta memberikan dukungan kepadaku.
4. Alamamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan dan telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, lahir pada tanggal 8 September 1997 di Bandar Lampung, Kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung. Merupakan putra ke-2 dari pasangan bapak Zalikin dan ibu Elfa Diana.

Pendidikan yang pernah ditempuh :

1. SD AL-KAUTSAR Bandar Lampung, 2009.
2. SMPN 22 Bandar Lampung, 2012.
3. SMAN 14 Bandar Lampung, 2015.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).





## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebar Kebencian Di Jejaring Sosial Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri raden Intan lampung. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawanya.
2. Dr. K.H. Khoirudin Tahmid, M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Dr. Nurnazli, S.H., Sag., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Dr. KH. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I dan H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Mahasiswa Jurusan Siyasah Angkatan 2015. Khususnya kelas tempatku menuntut Ilmu dibangku perkuliahan, kelas Siyasah C, teman-teman seperjuangan KKN kelompok 249 desa Sukamulya, Banyumas Pringsewu. Semoga kesuksesan akan selalu membersamai kita semua.

Saya sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai Amal dan Ibadah, *Amin Yaa Robbal'Alamin.*

*Billahi taufik wal hidayah*

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, September 2019

Penulis

Muhammad Rizki Kurniawan Fareza

NPM. 1521020282



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PESEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian Dan Batasan Masalah .....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
G. Signifikasnsi/Manfaat Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian .....	7

### **BAB II      FIQH SIYASAH DAN FITNAH**

A. Kajian Fiqh Siyasah .....	11
B. Kajian Fitnah.....	20
C. Tinjauan Pustaka .....	45

### **BAB III      UNDANG – UNDANG NO.19 TAHUN 2016 (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) TENTANG PENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING SOSIAL**

A. Undang-Undang ITE Di Indonesia .....	47
---	----



B. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) .....	49
C. Asas Dan Tujuan Undang-Undang Penyebar Kebencian .....	51
D. Sudut Pandang Undang-Undang ITE Tentang Penyebar Kebencian.....	52
E. Pengaturan Tindak Dan Sanksi Pidana Dalam UU ITE Tentang Penybar Kebencian.....	53
F. Contoh Kasus Penyebaran Kebencian .....	56

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial Menurut Undang- Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) .....	60
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) Tentang Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial.....	63

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Penutup .....	68

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penegasan judul digunakan untuk mendapat pengertian yang tepat untuk memahami maksud yang terkandung dalam judul. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan maksud penulisan judul ini dikarenakan untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dari skripsi yang berjudul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK", sebagai berikut :

Fiqh Siyasah adalah aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Iqbal ,*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) h. 4.

<sup>3</sup>Roni Pratriadi, "Tentang UU ITE" (On-line), tersedia di :<http://undang-undang-ite.blogspot.co.id/> (29 mei 2019).

Penyebar Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Jejaring Sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian yang meninjau secara mendalam tentang tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penyebar kebencian di jejaring sosial menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan yang mendorong di pilihnya judul skripsi ini adalah:

### **1. Alasan Objektif**

Meninjau Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial. Hal ini disebabkan karena Undang-undang tersebut telah membunuh kebebasan berpendapat dan berekspresi warganegara.

---

<sup>4</sup>Ricky Jordan, “*hoax, hate speech dan badan cyber nasional*” (On-line), tersedia di <http://hmip.fisip.ui.ac.id/hoax-hate-speech-dan-badan-cyber-nasional/> (1 juni 2019).

<sup>5</sup>Hendra Juliansah, “Tentang Jejaring Sosial Medsos” (On-line), tersedia di <http://tentang-jejaring-sosial-medsos.blogspot.co.id/> (12 November 2019).

Mendalami dan memperluas wawasan terkait masalah penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial menurut fiqh siyasah.

## 2. Alasan Subjektif

Selain alasan diatas yang mendasari di pilihnya judul ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran bagi penegak hukum dalam pelaksanaan penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring sosial kepada masyarakat.

Permasalahan ini belum ada yang membahas khususnya di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selain itu sebagai syarat penulis menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa (SY).

## C. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak diahirkan yang dijamin oleh konstitusi. Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) : *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Redaksi Bmedia, *UU 1945 & Perubahannya*, (Jakarta, Bmedia Imprit Kawan Pustaka, 2016),h. 33.



Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif yang di pergunakan untuk membatasi perbuatan perbuatan yang melanggar di media social terkait dengan rasa kebencian. Sebagai contoh Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Terkait pemahaman dari penyebar kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas, sehingga Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dapat menjadi boomerang untuk memfitnah/menuduh individu ataupun kelompok karena penjarbarannya yang masih multitafsir.

Dalam Islam fitnah/tuduhan merupakan satu perbuatan yang sangat tercela karena dengan melakukan fitnah maka kita dapat mencemarkan nama baik, menurunkan harga diri orang yang difitnah. Sebuah dalil yang menyebutkan larangan fitnah/tuduhan dalam Al-quran adalah :

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ  
مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ  
فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (البقرة: 191)

Artinya : “Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka, kemudian usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan janganlah kamu perangilah mereka di Masjidil Haram terkecuali jika mereka perangilah kamu di tempat tersebut. Jika mereka perangilah kamu maka perangilah mereka. Demikianlah balasan untuk orang kafir”(QS.Al-Baqarah : 191)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Syaamil, 2007), h.30.

Ayat diatas menunjukkan bahwa fitnah sangat dilarang dalam Islam, serta lebih kejam dari pada pembunuhan. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) ini sebagai contoh, pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian dan juga terkait dengan perbuatan perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal ini karena setiap perbuatan di media sosial, memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini public yang berkembang di masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bahwa adanya Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial bisa membunuh kebebasan berpendapat dan berekspresi di jejaring sosial dan juga dapat menimbulkan adanya fitnah/tuduhan yang menimbulkan dampak negatif bagi individu ataupun kelompok. Hal ini bertentangan dengan hukum islam, bahwa dilarang untuk memfintah sesama muslim. Maka untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) terkait penyebar kebencian di jejaring sosial, peneliti tertarik mengangkat dan meninjau permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul : “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING

---

<sup>8</sup>Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Social Untuk Kementrian Perdagangan RI*, (Jakarta Pusat; 2014,)h. 26-27.

## SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

### **D. Fokus Penelitian dan Batasan Masalah**

1. Fokus penelitian yang akan di teliti adalah tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring sosial yang menyebabkan fitnah.
2. Batasan Masalah pada penelitian ini terdapat pada pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penyebar kebencian yang menyebabkan fitnah, sehingga tidak akan terjadi masalah yang terlalu lebar dan luas.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebar kebencian di jejaring sosial menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE)?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) Tentang Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial?

### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam bahasan penelitian ini, adalah :

1. Mengkaji bagaimana jalannya proses Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebaran kebencian di jejaring sosial.
2. Untuk meninjau pandangan fiqh siyasaah terhadap Undang-undang No.19 tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum Islam, baik oleh mahasiswa ataupun oleh masyarakat.
2. Kegunaan praktis yaitu diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan persoalan yang berkaitan dengan fiqh siyasah.

#### **G. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian pada kali ini adalah bisa menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat umum untuk lebih berhati hati lagi dalam menggunakan jejaring sosial, gunakanlah jejaring sosial sebaik mungkin agar tidak terjadi dampak negative.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

###### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur



(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.<sup>9</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai Tinjauan Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring social dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring social yang menyebabkan fitnah.

2. Sumber Data Penelitian

Terdapat sumber data penelitian, yaitu :

- a. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>11</sup> Bahan primer terdiri dari perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang undangan dan putusan hakim. Dalam tulisan ini sumber primer yang digunakan adalah :

---

<sup>9</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014),h. 9.

<sup>10</sup>Abdul Khaidir Muhammad, *Hukum Dan Politik Hukum*, (Bandung; Citra Ditya, 2014),h. 216.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana,2008),h.141.

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku literature hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media cetak atau media elektronik.<sup>12</sup>

### 3. Tehnik Pengumpulan

Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penellitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan.

### 4. Analisis dan Pengolahan Data

a. Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisi data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga ahirnya dapat ditarik kesimpulan.<sup>13</sup> Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian pengertian dalam menjawab

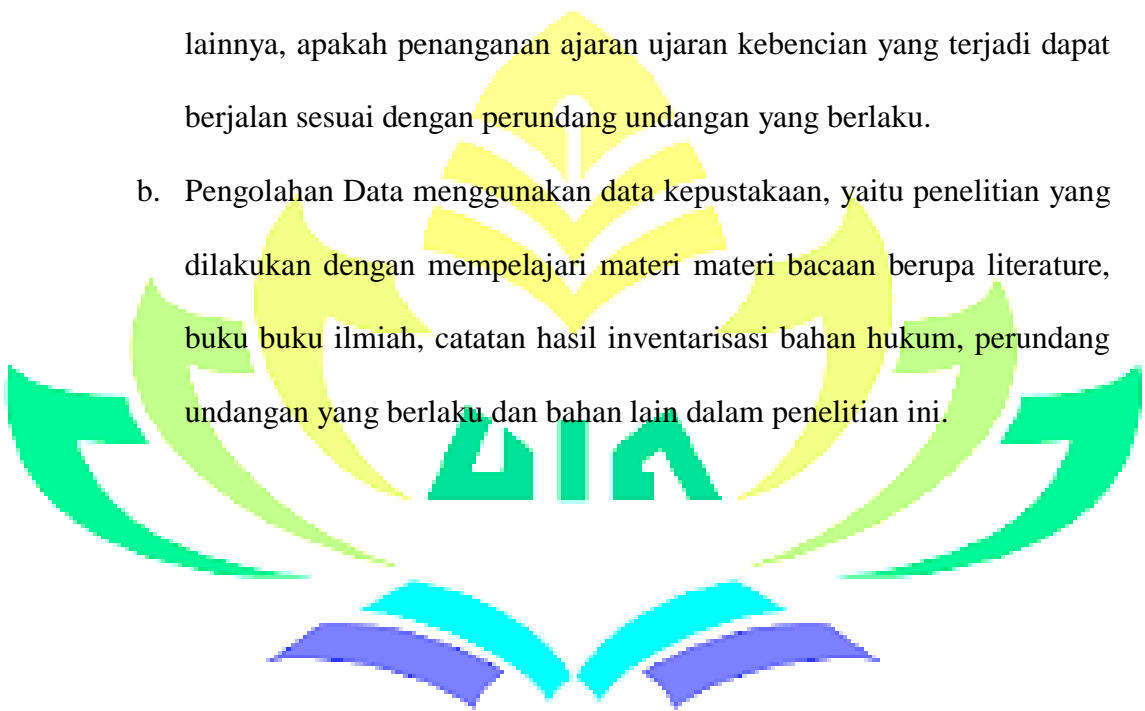
---

<sup>12</sup>Abdul Khaidir Muhammad, *Hukum Dan.....*h. 67.

<sup>13</sup>Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1996), h. 112.

permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum. Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literature, perundang undangan, dan contoh kasus yang berkaitan. Kemudian data tersebut diolah dan akan diperoleh gambaran apakah suatu aturan telah bertentangan dengan aturan lainnya, apakah penanganan ajaran ujaran kebencian yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

- b. Pengolahan Data menggunakan data kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi materi bacaan berupa literature, buku buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.



## BAB II FIQH SIYASAH DAN FITNAH

### A. Kajian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* yaitu “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai ke ada kedalamannya.<sup>14</sup> *Fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “fa qa ha” yang terdapat didalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>15</sup>

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian dan paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>16</sup>

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung, Prenada Media: 2003), h. 5.

<sup>16</sup>Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), h. 6.



tafshil<sup>17</sup> (terici, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasah* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*.<sup>18</sup> Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.

---

<sup>17</sup>T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*,(Jakarta, Bulan: 1974), h. 26.

<sup>18</sup>Haris Sulaiman al-Faruiqi, *Al-Mu'jam al-Qanuni*, (Bairut, maktabat Lubnan: 1983), h.

Kata *siyasah* terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana di anut Al-Maqrizy menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbasis kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasyasus-siyasatun*,<sup>19</sup> yang semula berarti mengatur, memelihara, mengurus, yang bersifat kenegaraan dan politis.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”<sup>20</sup> Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan.”

Adapun Ibn manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”<sup>21</sup>

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan kepentingan dalam pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.

---

<sup>19</sup>Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab* Jilid 6 (bierut: Dar al-Shadir,1986), h. 108.

<sup>20</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar’iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5.

<sup>21</sup>Ibn Manzur, *Lisan al.....*, h. 362.

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>22</sup>

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung didalamnya hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

#### 1. Konsep Negara Dalam Islam

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan

---

<sup>22</sup>Ibn Manzur, *Lisan al...* h. 362.

Al-Quran dan Al – Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-tanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif).

a. Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah

---

<sup>23</sup>Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung : Mizan , 1996), 57

SWT dalam syari'at Islam.<sup>24</sup>

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan Negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.

---

<sup>24</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada2001), 62

3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.<sup>25</sup>

b. Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid., 65

<sup>26</sup>Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, ( Bandung : Mizan, 1993), Cet II. 247

Berdasarkan Al-Qu`an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

c. Qadha'iyyah

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukum- hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah*.....65



## 2. Wewenang *tasyri'iyah*, *tanfidziyah*, dan *qadha'iyah*

Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>28</sup>

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).

---

<sup>28</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi*....62

## B. Kajian Fitnah

### 1. Fitnah Tanpa Alat Bukti dan Sanksinya

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*albayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.<sup>29</sup> Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqh membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fiqh alat bukti disebut juga *At-Turuq Al-Isbat*.<sup>30</sup>

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Supomo misalnya, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa *hujjah* (bukti-bukti) itu ada 6 macam.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Sulaikhah Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hal 135.

<sup>30</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal 207.

<sup>31</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal 136.

- a. *Iqrar* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Nukul* (menolak sumpah)
- d. *Qasamah* (sumpah)
- e. Keyakinan hakim
- f. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Jarīmah, Jarīmah berasal dari kata (جرمي) yang sinonimnya (كس و نطع) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia.<sup>32</sup> Sedangkan pengertian jarīmah menurut istilah adalah perbuatan yang dilarang syara' yang diancam dengan hukuman ta'zīr .

Ta'zīr juga diartikan *Ar-Radu Wa Al-Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman Ta'zīr adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>33</sup>

Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang- undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah Wa Al-„Uqubah fi Al Fiqh Al islamy*, Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, Kairo, tanpa tahun, h 22.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) Hal. 1-19.

- a. Secara yuridis normatif di satu aspek harus di dasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif memiliki unsur materil, yaitu sikap yang dapat di nilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diprintahkan oleh Allah swt.
- b. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut *Mukallaf* , yaitu orang islam yang sudah baligh dan berakal sehat.<sup>34</sup> Jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dalam Fiqh Jinayah jarīmah di bagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarīmah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman. Al-Quran dan Al-Hadis. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

1) Jarīmah Hudūd

Jarīmah *hudūd* meliputi perzinahan, *qazaf* (menuduh zina), minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

2) Jarīmah Qisās atau Diyat

Jarīmah *qisās* atau *diat* meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja.

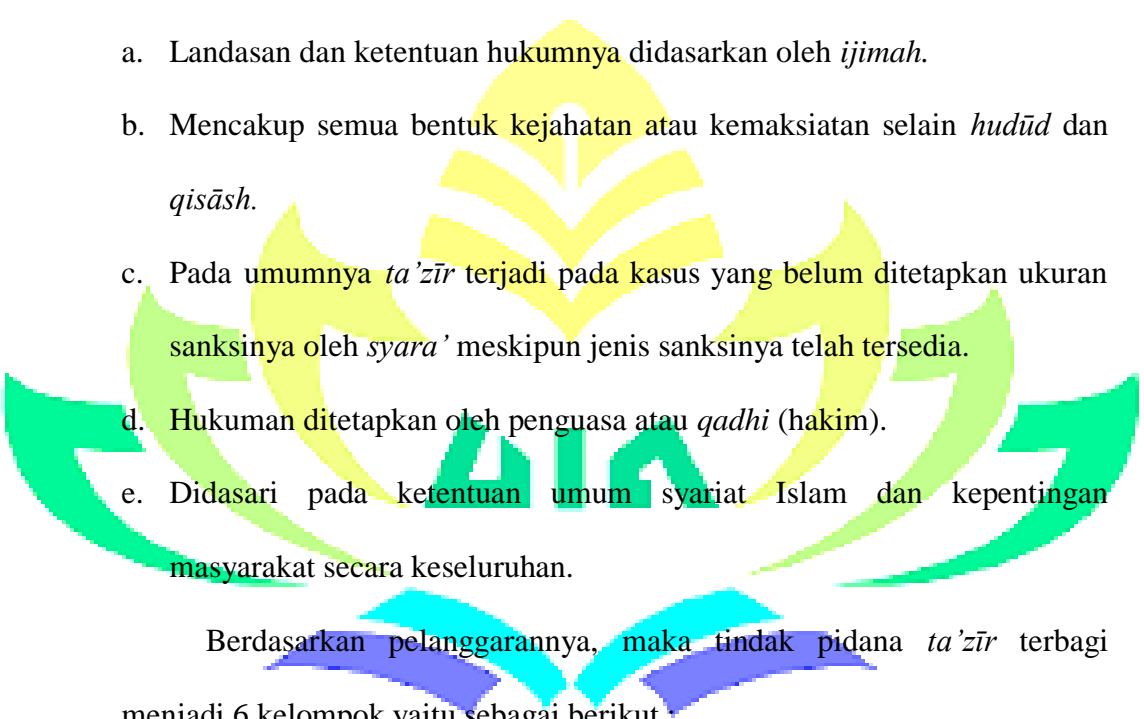
3) Jarīmah Ta'zīr

---

<sup>34</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) Hal 22

Jarīmah *Ta'zīr* adalah jarīmah yang bentuk sanksinya tidak disebutkan di dalam Al-quran dan Hadis. Untuk menentukan jenis dan ukuran sanksinya menjadi wewenangan hakim atau penguasa setempat.

Tindak pidana *ta'zīr* merupakan tindak pidana yang paling luas cakupannya yaitu pelanggaran atau kemaksiatan apa saja selain hudūd dan jināyah . Adapun Ciri-ciri Tindak Pidana *Ta'zīr* :

- 
- a. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan oleh *ijimah*.
  - b. Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain *hudūd* dan *qisāsh*.
  - c. Pada umumnya *ta'zīr* terjadi pada kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *syara'* meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
  - d. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau *qadhi* (hakim).
  - e. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana *ta'zīr* terbagi menjadi 6 kelompok yaitu sebagai berikut :

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan diantaranya :
  - 1) Perbuatan yang melanggar kesusilaan
  - 2) Perbuatan yang melanggar kesopanan
  - 3) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri
  - 4) Perbuatan yang penculikan.
- b. Pelanggaran terhadap kemulian diantaranya :

- 1) Tuduhan palsu.
  - 2) Pencemaran nama baik.
  - 3) Penghinaan, hujatan dan celaan.
- c. Perbuatan yang merusak akal yang diantaranya :
- 1) Perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu dapat merusak akal, seperti menjual membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan atau mempromosikan *khamr*, narkoba, psikotropika dan sejenisnya.
  - 2) Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum atau apapun dengan maksud untuk dibuat *khamr* oleh pembelinya.
- d. Pelanggaran terhadap harta yang diantaranya :
- 1) Penipuan dalam masalah *muamalat*.
  - 2) Kecurangan dalam perdagangan.
  - 3) *Ghasab* (meminjam tanpa izin).
  - 4) Penghianatan terhadap amanah harta.
- e. Gangguan keamanan, diantaranya :
- 1) Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara *hudūd* dan *qisāsh*.
  - 2) Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
  - 3) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain.
- f. *Subversi* atau gangguan terhadap Negara, diantaranya :
- 1) *Makar*, yang tidak melalui pemberontakan.

2) *Spionase* (mata-mata).

3) Membocorkan rahasia Negara.<sup>35</sup>

Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya.

Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman.

Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarīmah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

Sedangkan bentuk-bentuk hukuman *ta'zīr* itu sendiri menurut ulama" Abdul Qadir Audah membagi *ta'zīr* menjadi tiga bagian. Yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarīmah hudūd* dan *qisāsh diat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah dianggap sebagai kejahatan, seperti mati subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian bukan harta benda.

---

<sup>35</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hal 55-57



- b. Jarīmah *ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zīr* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.
- c. Jarīmah *ta'zīr* yang jenis jarīmahnya telah ditentukan oleh nash. Tetapi sanksinya diserahkan pada penguasa seperti sumpah palsu, sanksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan penghinaan.<sup>36</sup>

Khususnya menurut dalam Jarīmah *Ta'zīr* terdapat bermacam-macam hukuman yang ditentukan atau yang telah ditetapkan dan hikmah disyariatkannya hukuman Jarīmah *Ta'zīr*. Untuk lebih jelasnya berikut uraian mengenai macam- macam hukuman dan hikmah disyariatnya *ta'zīr* sebagai berikut:

- a. Hukuman Menurut Jarīmah *Ta'zīr*.

1) Hukuman Mati.

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* dalam hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak membolehkan penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila

---

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 19.

kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Madzhab hanafi juga membolehkan sanksi hukuman mati semisal hukuman mati terhadap pelaku yang berulang ulang melakukan tindak kejahatan. Contohnya pencurian berulang-ulang dan menghina Nabi berkali-kali yang dilakukan oleh seorang kafir dzimi yang baru masuk islam.

## 2) Hukuman Jilid (cambuk)

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* di dasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat.<sup>37</sup>

Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga hukuman jilid pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali dengan syarat bahwa

---

<sup>37</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000) hal 145

jarīmah *ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan jarīmah hudūd.

Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarīmah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarīmah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarīmah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 10 kali.

Zina hukuman jilidnya seratus kali, *qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamar ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. Untuk kasus pencemaran nama baik atau penghinaan menurut hadist riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah mengancam hukuman cambuk sebanyak dua puluh kali kepada seseorang yang mengejek orang lain dengan sebutan lembek atau banci (HR. Ibnu Majjah).<sup>38</sup>

### 3) Hukuman Kawalan (pengasingan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi ulama berbeda pendapat Ulama“ Syafi“iya menetapkan batas tertingginya satu tahun karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarīmah zina.<sup>39</sup>

Sementara para ulama lain menyerahkan semuanya pada

---

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*....19.

<sup>39</sup>Ibid

penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman Kawalan tidak terbatas. Sesudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarīmah-jarīmah yang berbahaya.

#### 4) Hukuman *Salib*

Hukuman *Salib* sudah dibicarakan dalam jarīmah gangguan keamanan (*hirabah*), dan untuk jarīmah ini hukuman tersebut merupakan hukuman *hadd*. Akan tetapi untuk jarīmah *ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati, melainkan terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.<sup>40</sup>

#### 5) Hukuman ganti rugi (*Gruramah*)

Hukuman ganti rugi ditetapkan juga oleh syari'at islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

---

<sup>40</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam....*59

6) Hukuman pengucilan (*al Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah.

7) Hukuman ancaman (*Tahdid*) teguran (*Tanbih*) dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

2. Hikmah disyariatkannya hukuman *ta'zīr*

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zīr* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam hukuman *hadd*. Hanya saja hukuman *ta'zīr* ini berbeda dengan hukuman *hadd* karena tiga hal berikut ini:<sup>41</sup>

- 1) Pelaksanaan *hadd* tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman *ta'zīr* yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.
- 2) Dalam kasus *hadd* tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus

---

<sup>41</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana* ....97

hukuman *ta'zīr* hal itu diperbolehkan.

- 3) Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman *ta'zīr* orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya.

Pernah terjadi pada masa kholifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget dan ketakutan, akhirnya Umar ra. Menanggung diat atas janinnya.

Dengan demikian bagi siapa saja yang menghina baik dengan terang-terangan maupun dengan sindiran, maka dia berhak mendapatkan hukuman, baik itu hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat yang nantinya berdasarkan keputusan hakim dan diharapkan hakim memberikan hukuman yang adil dan pantas-pantasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman penghinaan itu

bermacam-macam hukumannya, yaitu: teguran dan ancaman, dipenjara, dijilid (dicambuk) dan dihukum mati.<sup>42</sup>

## 2. Arti Fitnah dan Macam-Macam Fitnah

### a. Arti Fitnah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang atau bisa juga disebut berburuk sangka. Kata fitnah berasal dari bahasa arab yang artinya *ujian* dan cobaan.<sup>43</sup>

Fitnah menurut kamus besar bahasa Arab adalah

---

<sup>42</sup>Ibid 78

<sup>43</sup>“DalamIslam.com” diakses dari (On-line) <http://dalamislam-com.cdn> pada tanggal 29 Juni 2019.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

(الأنبياء : 35)

Artinya : "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan" (QS.Al-Anbiya : 35)<sup>44</sup>

Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan bahwa buruk sangka adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman buruk sangka itu seperti haramnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukannya kepada diri sendiri atau dalam hati, sehingga kita berprasangka buruk kepadanya. Apa yang Al-Ghazali maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat pada diri orang lain. Bisikan hati yang hanya terlintas sedikit saja maka itu di maafkan. Sedangkan yang dilarang adalah menyangka buruk, dimana perasangka adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati.<sup>45</sup>

Sementara menurut Imam Al-Qurthubi menerangkan kepada kita bahwasannya buruk sangka itu adalah melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa dasar yang benar. Yaitu seperti menuduh orang lain melakukan kejahatan, akan tetapi tanpa disertai oleh bukti bukti yang membenarkan tuduhan tersebut. Tidaklah semata-mata Rasulullah Saw melarang umatnya dari suatu perbuatan tertentu, kecuali karena

---

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran*.....324

<sup>45</sup>Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003)h. 379.



perbuatan tersebut bisa berdampak buruk. Hal buruk itu sama saja dengan Fitnah.

Memfitnah adalah menuduh dan menyatakan orang lain melakukan sesuatu keburukan, padahal orang itu tidak melakukan hal yang dituduhkan kepadanya itu. Memfitnah merupakan penyakit dan penyelewengan lidah yang sangat membahayakan, karena ia akan menyebabkan tuduhan bahkan bisa mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu Islam menyatakan bahwa fitnah itu lebih kejam bahanya dari pembunuhan. Hal itu wajar karena fitnah bisa menyebabkan keresahan, ketidak harmonisan, saling mencurigai, dan tidak adanya rasa saling percaya antar anggota masyarakat, sehingga ahirnya menyebarlah rasa ketidaktentraman dalam masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>46</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 217 :

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة : 217)

Artinya : “Dan berbuatlah fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh” (QS.Al-Baqarah : 217)<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas bahwasanya Islam sangat melarang adanya fitnah, dan menganjurkan bahwa setiap umat manusia haruslah berkata baik dan tidak menyebar kebohongan. Dalam sebuah hadist ma'tsur seseorang sahabat yang bernama Al-fuadhail bin 'Iyadh berkata : “berfikirlah terlebih dahulu baru kemudian berbuat, sebelum kalian

---

<sup>46</sup>Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah* (Jakarta: Gema Insani, 2004),h,19.

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran*.....34.

menyesal. Janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, karena keutuhannya akan senantiasa terbagi-bagi, kebaruannya akan memudar, kenikmatannya rusak, dan keremajaannya akan menjadi pikun dan lanjut usia”.

b. Macam-Macam Fitnah

Fitnah merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT karena dapat menyebabkan perpecahan bagi umat manusia. Diri manusia tidak dapat menghindari fitnah yang di tentukan Allah untuknya. Barang siapa yang bersungguh sungguh dan bertekad hingga ia tidak tergelincir kedalam fitnah tersebut, maka Allah Swt menunjukkan kepadanya jalan menuju kemenangan di ahirat.<sup>48</sup> Allah Swt berfirman,



وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  
(الأنكبوت : 69)

Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Ankabut : 69)<sup>49</sup>

Adapun beberapa macam fitnah menurut Nabi Muhammad SAW yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah, yaitu :

- 1) Fitnah Kubur dan Neraka.
- 2) Fitnah Kehidupan dan Kematian.

---

<sup>48</sup>Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak....*,h, 9.

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran.....*404.

### 3) Fitnah Dajjal.<sup>50</sup>

Fitnah Kubur dan Neraka yaitu siksa yang dirasakan di alam kubur dan siksa yang pedih di neraka. Fitnah ini adalah bencana besar bagi manusia yang ketika hidup di dunia tidak mau beriman kepada Allah dan hari ahir.

## 3. Penyebab dan Dampak Negatif Fitnah

### a. Penyebab Fitnah

Dari makna makna fitnah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, maka tanpa memperhatikan kenyataan bahwa fitnah adalah manifestasi dari perbuatan dosa, fitnah terkait langsung kepada spiritualitas manusia. Fitnah adalah tanda dari penyakit psikologis dasar yang berbahaya dan harus dicari dalam bidang spiritual dan psikologis.

Penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam fitnah yaitu :

- 1) Kesenangan hati menerimanya.
- 2) Tenggelam dengan obralan.
- 3) Menerima jabatan yang tidak mampu dilaksanakannya.
- 4) Sibuk berbicara, tanpa bekerja.
- 5) Iri hati, dan amarah

Setiap tindakan individu manapun berasal dari kondisi tertentu yang terletak dalam kata hatinya, sebagai hasil dari manifestasi kondisi tersebut yaitu lidah, penerjemah perasaan manusia mengucapkan fitnah. Salah satu alasan fitnah menyebar luas adalah orang yang memfitnah

---

<sup>50</sup>H. Saifuddin Aman, *Mengais Berkah Menepis Fitnah*, (Jakarta, Al Mawardi Prima, 2002) h. 174.

tidak memperhatikan terhadap efek sesudahnya yang berbahaya. Manusia tidak berfikir dua kali dalam melakukan kejahatan, tanpa perhatian kepada pengaruh sesudahnya sehingga menghilangkan kendali manusia atas kemampuannya untuk menahan diri dari mengikuti hawa nafsu yang tidak menghiraukan pengetahuannya akan realitas mereka yang berbahaya.

Untuk membawa jiwa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya, manusia harus memperkuat semua pikiran mulia dalam pikirannya untuk melawan gagasan atau inspirasi apapun yang merusak. Dengan menjaga lidah seseorang teradap fitnah, maka orang tersebut telah mengambil langkah pertama dalam menuju kebahagiaan.<sup>51</sup>

#### b. Dampak Negatif Fitnah

Kerugian yang paling berbahaya dari fitnah adalah pengrusakan kepribadian spiritual dari hati nurani orang yang memfitnah. Orang yang melanggar jalan alami pikiran mereka akan kehilangan keseimbangan berfikir dan system prilaku mereka yang mulia. Terlebih lagi, membahayakan perasaan orang dengan membuka rahasia dan kesalahan mereka.

Fitnah mengalihkan pikiran yang suci ke titik dimana gerbang pemikiran dan pemahaman menjadi buntu. Saat pembawa fitnah membahayakan masyarakat, maka masyarakat menemukan fitnah telah membuat kerusakan besar pada anggotanya. Fitnah memainkan peran yang

---

<sup>51</sup>Sayyid Mujtaba Musawi Lari, *Hati: Penyakit dan Pengobatannya*, terj. Hadi Prasetyo (Jakarta: IKAPI, 2005), 62-65.

menghancurkan dalam menghasilkan permusuhan dan kebencian di antara anggota-anggota masyarakat yang berbeda. Jika dibiarkan menyebar ke bangsa manapun, maka fitnah akan menimbulkan berbagai macam akibatnya, yaitu :

- 1) Fitnah akan mengambil kejayaan, nama baik, dan menciptakan sebuah pertikaian yang tidak dapat di perbaiki di bangsa itu.
- 2) Pecahnya persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
- 3) Rasa saling curiga.
- 4) Menebarkan kebencian.
- 5) Harmoni kehidupan masyarakat terancam rusak
- 6) Lahir bibit-bibit kerusuhan yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dalam masyarakat.<sup>52</sup>
- 7) Membuat manusia lupa terhadap kebenaran yang sebenarnya.
- 8) Menepiskan agama, menghilangkan akal.
- 9) Tidak mendengar nasehat

Nilai-nilai moral yang diajarkan Islam untuk semesta alam ini sangatlah mulia, namun nilai-nilai moral tersebut sering diabaikan begitu saja. Hanya karena dibakar kedengkian seseorang tega memfitnah tetangganya sehingga terjadi pertengkaran dan bagi yang sudah berumah tangga bisa jadi diahiri dalam perceraian. Dan karena ambisi untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi, seseorang tega memfitnah atasannya sehingga menghancurkan karirnya

---

<sup>52</sup>Saiful Amin Ghofur, *Bahaya Akhlak Tercela* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007),h.20.

#### 4. Cara Menyikapi Fitnah

Fitnah adalah bencana yang mempunyai banyak makna yang dapat menimpa kehidupan manusia, baik dari segi makna cobaan maupun siksaan dari perbuatan manusia. Beberapa nilai yakni diantaranya kedailan, kejujuran, amanah, kesetaraan manusia tanpa membedakan gender, menghormati atas keyakinan agama orang lain dan sebagainya,<sup>53</sup> merupakan bentuk dari pencegahan fitnah. Adapun beberapa cara yang dapat dicoba untuk menyikapi fitnah :

##### a. Sabar

Sabar merupakan salah satu tiang iman dan juga salah satu komponen budi pekerti mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam Kitab Al-Ta'rifat memberikan definisi sabar sebagai meninggalkan rintihan dan pengaduan terhadap penderitaan yang dialaminya.<sup>54</sup>

Dalam pengertian umum yang dimaksud dengan sabar bukan berarti menyerah begitu saja dengan keadaan, akan tetapi berikhtiar sampai berhasilnya suatu cita cita dengan ketetapan hati yang teguh. Para ahli di filsafat islam memperluas kajian sabar, yaitu bersikap sabar diantaranya :

##### 1) Sabar disaat mendapat musibah

---

<sup>53</sup>Siti Mahmuda, Politik Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahmud MD) (Jurnal Al-'Adalah Vol.X,No.4 Oleh UIN Raden Intan Lampung, 20 Juli 2012 ), h.408 (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.id/>, ( 20 Agustus 2019, 20:30), dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>54</sup>Basri Iba Asghary, Solusi Al-Quran Tentang Problema Sosial, Budaya (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 258.

Musibah ditimpakan Allah kepada hamba-Nya bermacam-macam bentuknya. Dan musibah itu sebenarnya merupakan sarana untuk menguatkan iman.

- 2) Sabar dalam konteks Ibadah.
- 3) Sabar pada waktu berhadapan dengan maksiat.
- 4) Sabar atas kemilaunya duniawi.

Apabila sabar merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia pada umumnya, maka sifat itu jauh lebih menjadi kebutuhan dasar bagi orang muslim. Karena iman dalam sisi tertentu jauh lebih berat menghadapi sikap menyakitkan, ujian dan cobaan pada harta, diri sendiri dan semua miliknya yang berharga. Alam semesta menghendaki mereka memiliki musuh musuh yang akan memperdayanya dan menanti nanti marabahaya menyimpannya. Demikian pula Allah menjadikan iblis sebagai musuh Nabi Adam As, Namrudz menjadi musuh Nabi Ibrahim As, Firaun menjadi musuh Nabi Musa As dan Abu jahal sebagai musuh Nabi Muhammad Saw.<sup>55</sup>

b. Memohon Ampunan dan Taubat

Dalam bahasa arab kita sering mendengar kata *istighfar*, maksudnya adalah memohon ampunan atas segala dosa kepada Allah Swt, yang di dalamnya memohon agar Allah berkenan melindungi dirinya dari perbuatan dosa. *Istighfar* adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia, bukan karena dengan *istighfar* dapat membatasi

---

<sup>55</sup>Ulaya Abi Ubaid, Sabar dan Syukur Gerbang Kebahagiaan di Dunia dan Ahirat (Jakarta: Amzah, 2012),h. 28.



manusia dalam melakukan perbuatan tercela dan juga karena Allah Swt berulang kali memerintahkan baik melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran maupun melalui lisan utusan-Nya (Rasulullah Saw).<sup>56</sup>

Taubat berarti menyesal atas terjadinya suatu dosa, menyesal yang disertai upaya dan harapan semoga Allah berkenan memaafkan, mengampuni dan menghapus dosa yang telah diperbuat. Istighfar dan taubat adalah dua hal yang sangat sering disebutkan secara bersama dalam Al-Quran. Setelah memerintahkan istighfar, senantiasa Allah menyusulnya dengan memerintahkan bertaubat.

c. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat

Apabila setiap manusia menyadari bahwa dirinya mempunyai asal usul yang sama, yaitu keturunan Adam dan Hawa, dan mempunyai Tuhan yang sama yaitu Allah Swt, tentu tidaklah sulit menjaga persatuan dan kesatuan umat.

Umat Islam sangat dilarang untuk bererai-berai, saling bermusuhan dan sebagainya. Semua umat manusia adalah hakekatnya satu umat walaupun berbeda suku, dan bangsa.<sup>57</sup>

Umat Islam adalah umat yang bersaudara. Mereka dituntut berjalan membantu kesatuan, bukan perpecahan. Bila yang satu sakit maka yang lainnya ikut pula merasakannya, ibarat bangunan, yang satu dengan yang lainnya sama-sama menguatkan.

---

<sup>56</sup>Su'aib H. Muhammad, Lima Pesan Al-Quran (Malang-Maliki Press, 2011), h. 87.

<sup>57</sup>*Ibid*

Berbicara tentang perwujudan persatuan dan kesatuan, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu memilih pemimpin yang beragama islam. Selanjutnya waspada terhadap fitnah dan hasut, lalu yang terahir menyelesaikan pertikaian yang timbul di kalangan umat.

#### d. Memahami Ayat-Ayat Allah

Kitab suci Al-Quran menyebut alam semesta dan segala sesuatu yang ada termasuk manusia, sebagai ayat yaitu tanda tanda kekuasaan dari Allah Swt. Sebagai ayat, alam semesta dan jagat raya sesungguhnya mempertontonkan kekuasaan dan eksistensi Tuhan.<sup>58</sup> Allah Swt berfirman :



سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (الفصِيلَات: 53)

Artinya : “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (Q.S. Fussilat: 53).<sup>59</sup>

Setiap muslim sangat diperintahkan untuk memahami ayat ayat Allah. Menurut Al-Quran, pemahaman itu haruslah mencapai tiga tujuan. Pertama, memahami keberadaan alam semesta sebagai ayat (Q.S. Al-An'am, 6-97). Kedua, mengambil pelajaran dan ibarat (Q.S. Al-Nahl,

---

<sup>58</sup>Ilyas Ismail, Pilar Pilar Taqwa Dokterin Pemikiran, Hikmat dan Pencerahan Spiritual (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009),h.169.

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran*.....482.

16: 13). Ketiga, mengenal Allah Swt (Q.S. Al-Nahl 16: 17) dan bertaqwa kepada-Nya (Q.S. Yunus, 10: 6).

Menurut Murata, sebenarnya ada dua jenis ayat yang diperlihatkan Tuhan kepada manusia. Pertama, petunjuk serta wahyu Allah Swt yang disampaikan kepada Nabi-nabi. Kedua, karya serta ciptaan Allah Swt yang berwujud alam semesta dan jagat raya. Dengan begitu, sebagaimana setiap sepotong kayu atau firman disebut dengan ayat. Maka demikian juga setiap dan sejengkal dari alam raya adalah ayat.<sup>60</sup>

Setiap muslim sesungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk memahami dan mencerna serta mencari suatu kebenaran dari ayat diatas. Kebenaran yang didapat dari ayat diatas diyakini tidak akan mengalami kontradiksi, karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Swt sebagai sumber segala kebenaran.

#### e. Itiqomah dan Mawas Diri

Ada beberapa alternatif yang dicanangkan untuk menghadapi berbagai macam strategi musuh yang bermaksud menghancurkan islam. Ada yang menonjolkan masalah dari pentingnya persatuan umat, pembentukan jamaah dan imamah serta melaksanakan dengan konsekuen semua petunjuk dasar ajaran Islam di dalam Al-Quran. Semua upaya itu pasti dapat ditempuh.

Ada tiga macam sikap yang harus diamalkan oleh umat islam dalam menghadapi tantangan dan pergeseran moral yang terjadi di

---

<sup>60</sup>Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Taqwa..., h. 169.

kalangan umat Islam. Pertama, membentuk pribadi yang penuh pendirian serta tidak goyah bila dibujuk rayu. Muslim seperti ini disebut dalam islam Istiqomah. Nabi Muhammad Saw diperintahkan Allah untuk memperlakukan kepada manusia bahwa beliau manusia seperti yang lainnya, hanya saja yang mendapat wahyu dan beliau memegang akidah dan sangat beristiqomah kepada-Nya. Kedua, menyiapkan generasi yang adanya penuh dengan cahaya keimanan yang siap membela islam dan kebenaran wahyu Ilahi dan selalu melakukan tindakan preventif, memelihara diri dari anasir yang diancam malapetaka atau api neraka. Nabi Ibrahim memberi teladan kepada kita semua untuk terus berdoa kepada Allah Swt agar menjauhkan diri dari tingkah laku menyembah berhala dan perintah memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Ketiga, mampu menjadikan diri kita sebagai pantuan dan teladan kepada orang lain, kepada anak dan istri, tetangga, saudara dll. Karena nabi Muhammad Saw diutus Allah untuk menjadi teladan bagi umat manusia dimana keteladannya adalah disiplin, ulet, sabar, bersih, mencintai ilmu, sangat penuh toleransi, saling mengasihi dan cinta persatuan.

#### f. Introspeksi Diri

Introspeksi dapat dipahami sebagai evaluasi internal, yaitu mengoreksi diri dari kesalahan, karenanya merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dan terpuji. Introspeksi sangat menjadi penting karena

setiap individu berpeluang serta berpotensi untuk melakukan hal yang salah dan khilaf.<sup>61</sup>

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang beriman. Pertama, bertaqwa kepada Allah Swt. Taqwa sebagai sikap hati-hati dari akibat-akibat buruk yang terkandung di dalam makna introspeksi diri.

Kedua, kita disuruh untuk berfikir jangka panjang dan jauh menatap kedepan. Rencana tentang masa depan ini harus didasarkan pada hasil evaluasi terhadap berbagai program dan aktivitas kita pada masa yang lalu. Jadi ini terdapat juga pesan untuk introspeksi diri.

Ketiga, harus menyadari bahwa Allah swt tidak tidur dan melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas kita. Disini juga terkandung makna introspeksi diri.

Imam Al-Ghazali melalui kitabnya *Ihya Ulum al-Din*, menganjurkan agar introspeksi diri dilakukan berkenaan dengan dua hal berikut ini:

Pertama, introspeksi terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Disini menurut Al-Ghazali bila seseorang ternyata telah melalaikan suatu kewajiban maka ia harus segera menggantinya dan menambahkannya dengan berbagai kebijakan lain.

Kedua, introspeksi terhadap dosa-dosa. Dalam kaitan ini, seseorang harus mengingat dan menyadari dosa-dosa yang pernah dilakukan untuk kemudian bertaubat. Ia harus menyesali dosa-dosanya itu dan harus berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan melakukannya lagi.

---

<sup>61</sup>*Ibid*

#### 4) Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary reasearch*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

A. Yudha Prawira dengan judul skripsi “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015*” didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan surat edaran Kapolri No SE/06/X/2015 antara lain ialah upaya non penal (preventif dan *pre-emptif*) dan upaya penal (represif). Namun yang diutamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan ujaran kebencian ini yaitu upaya preventif dan *pre-emptif* yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian antara lain yaitu, melakukan sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian ujaran kebencian (*hate speech*), itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi tindak pidana / kejahatan Ujaran Kebencian (*hate speech*) dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam melakukan

penanggulangan tindak pidana/kejahatan ujaran kebencian (hate speech) agar dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut.<sup>62</sup>

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Adreanus Sapta Anggara Pamungkas tahun 2016 tentang “*Perspektif HAM Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*”. Didalam jurnal tersebut penulis menyatakan bahwa substansi dari Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian berdasarkan redaksi isi muatan menunjukkan indikator sumit, didalam surat edaran, arti ujaran kebencian dimaknai dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan berita bohong. Ujaran Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis dan orientasi seksual. Substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian apabila dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur secara jelas untuk menanggulangi penyebaran ujaran kebencian, hal ini terkait dengan unsur-unsur kebencian. Apabila dicermati sebenarnya unsur-unsur kebencian sangatlah abstrak sebab kebencian ada didalam perasaan yang tidak terlihat jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi akibat dari kebencian yang dapat dilihat secara jelas.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>A.Yudha Pratama, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015”, (Lampung : Universitas Lampung, 2016)h.67.

<sup>63</sup>Adreanus Sapta Anggara, “*Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*”, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), h.80.

### **BAB III**

## **UNDANG – UNDANG NO.19 TAHUN 2016 (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) TENTANG PENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING SOSIAL**

### **A. Undang-Undang ITE di Indonesia**

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) mulai dirancang sejak maret 2003 karena saat itu mulai muncul berbagai macam kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan internet. Pemerintah melalui Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) merancang sebuah undang-undang yang mengatur seluruh aktifitas penggunaannya dan regulasi-regulasi dalam bidang ITE guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.<sup>64</sup>

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005, dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR-RI. Merespon surat yang dikirim oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPR-RI membentuk panitia khusus (PANSUS) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR-RI.<sup>65</sup>

Pansus RUU ITE mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan berbagai

---

<sup>64</sup> Amir Yusuf, Sejarah Terbentuknya UU ITE , dikutip dari (On-line) <https://www.scribd.com/dokumen//362441604/sejarah-terbentuknya-UU-ITE> (26 Agustus 2019).

<sup>65</sup> Andri Sofyan, UU ITE dan Perkembangannya, dikutip dari (On-line) <https://www.scribd.com/dokumen//UU-ITE-dan-Perkembangannya> (26 Agustus 2019)



pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR-RI menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUUITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung di dalam Pansus bentukan DPR-RI.<sup>66</sup>

Setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ITE ditetapkan selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan pembahasan dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 2007. Lalu dari tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (PANJA). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (TIMSUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008.

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>67</sup>

Pada 21 April 2008 Indonesia telah mengundangkan Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP

---

<sup>66</sup>Ibid

<sup>67</sup>Amir Yusuf, Sejarah Terbentuknya UU ITE , dikutip dari (On-line) <https://www.scribd.com/dokumen//362441604/sejarah-terbentuknya-UU-IITE> (26 Agustus 2019).

sebagai Undang-undang tindak pidana umum. Selain Pasal-Pasal pidana, undang-undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau *e-commerce*.<sup>68</sup>

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro-kontra terhadap Pasal-Pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi UU ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Revisi UU ITE disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 November 2016.<sup>69</sup>

#### **B. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE)**

Pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah

---

<sup>68</sup>Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2011),h.225.

<sup>69</sup>Fatahilah,Revisi UU ITE , dikutip dari (On-line) <https://www.scribd.com/dokumen//362441604/Revisi-UU-IITE> (26 Agustus 2019).

mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik.<sup>70</sup>

Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan *“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan”*, maka semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No.19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati hati dalam menggunakannya.<sup>71</sup>

Didalam UU No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun Sara yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya, sehingga kiranya perlu untuk para pengguna media sosial selalu beretika, hal ini agar pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dan tuduhan terhadap kelompok tertentu.

---

<sup>70</sup>Yusuf Anwar, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikutip dari (On-line)<http://www.computesta.com/2010/03/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik/#.V-pjsCh95PY> (25 Agustus 2019).

<sup>71</sup>Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. Asas dan Tujuan Undang-undang (ITE)

Undang-undang tentang penyebar kebencian dibuat karena adanya beberapa asas dan tujuan agar melindungi kepentingan masyarakat umum. Berikut adanya asas dan tujuan dibentuknya Undang-undang penyebar kebencian :

#### 1. Asas

Pemanfaatan teknologi (Informasi dan Transaksi Elektronik) dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

#### 2. Tujuan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

- e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.<sup>72</sup>

#### **D. Sudut Pandang Undang-Undang ITE Tentang Penyebar Kebencian**

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, teleks, huruf, tanda angka, kode, symbol atau perforasi yang telah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan melakukan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.<sup>73</sup>

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman terpenuhi, dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul, dalam undang-undang ITE pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum adalah pelaksana transaksi elektronik.

Penyebar kebencian merupakan tindakan yang bermotif jahat yang mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga seseorang atau sekelompok yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna dan kemampuan atau orientasi seksual. Secara hukum, penyebaran kebencian bisa dimintai pertanggung jawaban karena merupakan tindakan kejahatan.

---

<sup>72</sup>Amran Hadi, *Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU RI No.19 Tahun 2016* (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2017), h.7.

<sup>73</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016.

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar penggunanya. Masyarakat yang menggunakan media sosial akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi serta menghasilkan komunitas virtual.<sup>74</sup>

Pertumbuhan antara banyaknya jumlah pengguna media sosial juga semakin banyak juga ujaran kebencian tersebar di media sosial. Karakter media sosial bagi penggunanya itu sangat bebas. Apa yang ditampilkan di media sosial, belum tentu kenyataan penggunaannya sama persis. Jika seseorang dalam sehari-harinya pendiam, santun, tetapi tidak di akun media sosialnya. Ia menjadi kasar, jahat, dan membuat provokasi penyebar kebencian. Pengguna media sosial bisa bebas memakai kebaikan, kebenaran, keindahan, keburukan dan sebagainya.

#### **E. Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam UU ITE Tentang Penyebar Kebencian**

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28

---

<sup>74</sup>Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespon Ujaran Kebencian(*Hate Speech*) di Media Sosial, dikutip dari (On-line) <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespon-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. (26 Agustus 2019).

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*”.<sup>75</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah Kesalahan dengan sengaja, artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Berikut penjelasan tentang pasal 28 ayat 2 UU ITE :

1. *Sengaja artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*
2. *Dan pembuat juga mengerti bahwa yang dilakukannya itu tidaklah dibenarkan, dan mengerti informasi yang disebarkan berisi informasi yang bertujuan menimbulkan rasa benci dan permusuhan;*
3. *Melawan hukum : tanpa hak, sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa “tanpa hak” bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Sementara bercorak subjektif, terletak pada kesadaran pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang di formalkan dalam Undang-Undang;*

---

<sup>75</sup>Amran Hadi, *Ama ndemen Undang-undang Informasi...*, h.42.

4. *Perbuatan :menyebarkan;*
5. *Objek :Informasi;*
6. *Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras,danantargolongan(SARA).*<sup>76</sup>

Bagi siapapun yang melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).<sup>77</sup>

Disamping pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menjelaskan tentang penyebar kebencian, ada beberapa pasal yang juga dalam Undang-undang No.19 ITE yang membahas tentang pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong, yaitu :

1. Pasal 27 ayat 3 UU ITE

Pengaturan tentang pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 :  
*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*Bagi siapapun yang

---

<sup>76</sup>Ibid

<sup>77</sup>Maulana Kadri, Mengenal Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, Dikutip dari (On-line) <https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5ccb28703623ae1f0d69e5ea/mengenal-pasal-28-ayat-2-uu0ite?page=all> (12 September 2019 ).



melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## 2. Pasal 28 ayat 1 UU ITE

Pengaturan tentang penyebaran informasi ataupun berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>78</sup>

## F. Contoh Kasus Penyebaran Kebencian

Masalah penyebar/ujaran kebencian yang muncul dan terjadi adalah kasus yang sangat hangat dan menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat. Dan dalam beberapa waktu ini banyak sekali kasus yang terjadi dan menyebar luas dikarenakan factor kecanggihan dari teknologi serta adanya media social yang dengan sangat mudah menyebar luaskan informasi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Berikut beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan penyebar kebencian :

---

<sup>78</sup>Ama ndemen Undang-undang Informasi..., h.42.

## 1. Kasus Ahmad Dhani

Kasus Ahmad dhani bermula dari laporan yang diajukan Jack Boyd Lopian. Jack yang mengklaim sebagai pendukung Basuki Tjahaja Purnama (ahok) ini melaporkan unggahan dhani di akun twitter @AHMADDHANIPRAST. Ia menilai kicauan Dhani di twitter berisi kebencian. Dalam akun tersebut Dhani menulis “siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”. Perlu diingat Dhani sendiri adalah pendukung dari capres Prabowo kala itu. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa Ahmad Dhani dengan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana. Ahmad Dhani divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Postingan Ahmad Dhani tersebut dinilai dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>79</sup>



<sup>79</sup>Tersedia di : <https://www.kaskus.co.id/thread/5a27aed7dbd77046658b4577/polisi-limpahkan-berkas-kasus-ahmad-dhani-pekan-ini/> (13 November 2019)

## 2. Kasus Buni Yani

Buni Yani dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial melalui akun facebooknya. Buni Yani menyebarkan sebuah video tentang pidato Ahok di kepulauan seribu yang pada pidatonya ahok menafsirkan ayat yang salah Surat Al-Maidah 51. Akibat dari penyebaran video tersebut, sebagian umat muslim merasa agama islam telah di lecehkan oleh Ahok yang pada akhirnya terjadi demo yang menuntut ahok untuk di penjara atas dugaan penistaan agama. Dampak dari perbuatan penyebaran video tersebut Buni Yani dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media social yang menyebabkan dirinya dijerat pasal 28 ayat (2) UU ITE dan divonis 18 bulan penjara. Namun pada keterangannya Buni Yani mengatakan bahwa tujuan dari menyebarkan video tersebut adalah mengajak pengguna media social untuk berdiskusi, bukan untuk menyebarkan rasa kebencian yang mengandung unsur SARA.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup>Tersedia di : <https://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/113925/bandingkan-kasus-buni-yani-dan-ahok-guntur-romli-apa-karena-ahok-minoritas> (13 November 2019)

### 3. Kasus Yusniar Pencemaran Nama baik

Yusniar (27), seorang ibu rumah tangga asal Tamalate Makasar, Sulawesi Selatan, harus duduk di kursi persakitan. Dia diseret ke meja hijau karena dianggap mencemarkan nama baik anggota DPRD Jenoponto, Sudirman Sijaya melalui status akun facebooknya.<sup>81</sup>

Kasus ini bermula pada 13 maret 2016, saat itu ada 100 orang yang datang kerumah Yuniar. Mereka bermaksud membongkar rumah itu karena di klaim sebagai warisan sah ayah tiri Yuniar. Saat hal itu terjadi Yuniar mendengar “saya anggota DPRD, saya pengacara robohkan saja rumah ini”, namun hal itu tidak terjadi karena dicegah oleh anggota keluarga Yuniar. Akibatnya dengan kekesalannya Yuniar menuliskan status di akun facebooknya “Alhamdulillah ahirnya selesai urusan dengan pengacara bodoh, kok mau membela orang salah, padahal kenyataannya itu tanah orang tua saya, pergi kalian mengganggu saja”.

Status di facebook itu membuat Sudirman dan pengacaranya tersinggung dan melaporkan Yuniar dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ahirnya Yuniar dikenakan sanksi Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE NO.19/2016 Tentang ITE dengan hukuman 5 bulan penjara.

---

<sup>81</sup>Muhammad Fikri, “Kisah Yuniar, Terjerat Kasus UU ITE Karena Status “no mention”, tersedia di (On-line) [https://beritagar.id/artikel/berita/kisah-yuniar’terjerat-uu-ite-karena-status-no-mentions](https://beritagar.id/artikel/berita/kisah-yuniar%27terjerat-uu-ite-karena-status-no-mentions) ( 17 Juli 2019)

## **BAB IV ANALISIS**

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan menganalisis yakni tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) Tentang Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial Yang Menyebabkan Fitnah.

### **A. Penyebar Kebencian Di Jejaring Sosial Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE)**

Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan “*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan*”, maka semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No.19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati hati dalam menggunakannya.

Didalam UU No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun Sara yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijera bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan

dan mentransmisikannya, sehingga kiranya perlu untuk para pengguna media sosial selalu beretika, hal ini agar pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dan tuduhan terhadap kelompok tertentu

Pengaturan dan Sanksi tindak pidana UU ITE ini pun sangat tegas, berikut :

1. Pasal 27 ayat 3 UU ITE

Pengaturan tentang pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 :

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Bagi siapapun yang

melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Pasal 28 ayat 1 UU ITE

Pengaturan tentang penyebaran informasi ataupun berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa*

*hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Pasal 28 ayat 2 UU ITE

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”*. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE

Pengaturan tentang semua unsur di dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : *“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2,*

ayat 3, dan ayat 4”. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan dari Jo.Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Contoh kasus adalah kasus Ahmad Dhani yang juga sama dituduh menyebarkan kebencian di akun jejaring sosial twitter nya. Dalam akunnya itu berisi ciutan *“siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”*. Ahmad Dhani dikenai sanksi pidana Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan divonis hukuman 1 Tahun 6 bulan penjara.

Masih banyak contoh kasus seperti diatas, sebelum terjadinya lagi kasus seperti diatas perlu adanya pencegahan untuk tidak meneruskan kasus yang sama terjadi. Penanganan preventif dan represif adalah sebuah langkah yang tepat dan efektif untuk mencegah tindak penyebaran kebencian di tengah masyarakat umum, apabila langkah tersebut masih belum bisa menangani masalah ini maka solusi terakhirnya adalah diberlakukannya penjeratan pasal tindak pidana.

## **B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Undang – Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) Tentang Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial**

Pembuatan Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial sudah bermaksud baik untuk mencegah terjadinya penyebar kebencian, namun pasal ini dapat menyebabkan dan memicu



terjadinya fitnah karena masih multitafsir dalam penjabaran tentang penybar kebencian. Dalam islam adanya firman Allah Swt tentang larangan fitnah/tuduhan, yakni :

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قَتَلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (البقرة : 191)

“Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir” (QS.Al-Baqarah : 191).

Pandangan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) tentang penyebaran kebencian berbasis sara yang menyebabkan fitnah ditinjau isinya. Dalam pembuatan Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini bermaksud untuk tidak membiarkan kasus ujaran kebencian terjadi, yang mana ujaran kebencian dilarang oleh hukum Islam. Akan tetapi adanya Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini bisa menjadi boomerang yang menimbulkan fitnah di tengah masyarakat umum.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif ( Tanfidziyah ) dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan seperti

*Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tindakan Fitnah yang timbul dari adanya undang undang ini karena adanya faktor kebencian kepada seseorang kepada orang lain sehingga ia berani memfitnah/ menuduh orang tersebut. Jikalau Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini lebih tegas lagi dalam isinya , mungkin boomerang fitnah ini tidak akan terjadi.

Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya.

Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau

merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarīmah dan pelaku dikenakan hukuman.

Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarīmah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

Khususnya menurut dalam Jarīmah *Ta'zīr* terdapat bermacam-macam hukuman yang ditentukan atau yang telah ditetapkan dan hikmah disyariatkannya hukuman Jarīmah *Ta'zīr*, antara lain hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman kawalan, hukuman salib, hukuman ganti rugi, hukuman pengucilan dan hukuman peringatan.

Adapun cara untuk menyikapi terjadinya fitnah ini adalah dengan :

1. Sabar
2. introspeksi diri
3. Memohon Ampunan dan Taubat
4. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat
5. Memahami Ayat-Ayat Allah
6. Itiqomah dan Mawas Diri

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan peneliti, ada beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dari bahasan tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial (Studi Kritis Terhadap UU No.19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 2)” adalah sebagai berikut :

1. Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) adalah menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, penghinaan/pencemaran nama baik, serta menyebarkan berita bohong/hoax. Dalam kasus diatas pelaku kejahatan bisa di jerat maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring sosial adalah jika Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) ini dapat menimbulkan dosa dan pelanggaran maka pelaku dapat menerima hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan

atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarīmah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarīmah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

## **B. Saran**

Dalam pembuatan Undang-Undang seharusnya pemerintah lebih memperhatikan aspek-aspek dalam konteks Fiqh Siyasah, supaya adanya Undang-undang tersebut tidak menjadi boomerang fitnah bagi siapa pun. Adanya Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini bisa disebut dengan pasal karet dan perlu di pertimbangkan lagi isi dari pasal tersebut.

Kepada maysarakat diharapkan untuk lebih dewasa dan bijak lagi dalam menggunakan jejaring social agar tidak menggunakan jejaring social untuk menyebarkan kebencian serta tidak termakan isu isu dan berita bohong yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab, Buku, Jurnal dan Koran

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003)

Abdul Khaidir Muhammad, *Hukum Dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya, 2014)

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977)

Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Cet 2*, (Jakarta : MNC Publishing, 2016)

Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, (Jakarta, Gema Insani, 2004)

Al-Kamal, *Al-Quran Tajwid Warna Transliterisasi Per Kata Dan Terjemahan Per Kata* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu)

*Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU RI No.19 Tahun 2016* (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2017)

Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung, Prenada Media: 2003)

Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003)

Basri Iba Asghary, *Solusi Al-Quran Tentang Problema Sosial*, Budaya (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)

H. Saifuddin Aman, *Mengais Berkah Menepis Fitnah*, (Jakarta, Al Mawardi Prima, 2002)

Haris Sulaiman al-Faruiqi, *Al-Mu'jam al-Qanuni*, (Bairut, maktabat Lubnan: 1983)

Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab* Jilid 6 (bierut: Dar al-Shadir,1986)

Ilyas Ismail, *Pilar Pilar Taqwa Dokterin Pemikiran, Hikmat dan Pencerahan Spiritual* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009)

Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

K.H. Mawardi Labay El-Sulthani, *Lidah Tidak Bertulang*, (Jakarta, ISBN, 2002)

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya; Risalah Gusti, 1999)

Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, AL-‘ADALAH Vol. XII, No 1. Juni 2014

Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2014)

Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2008)

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Majalah Info Singkat Hukum Vol.IX No.17/Puslit/September/2017*, (Jakarta : DPR RI, 2017)

Redaksi Bmedia, *UU 1945 & Perubahannya*, (Jakarta, Bmedia Imprit Kawan Pustaka, 2016)

Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan dan Kenyataan* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010)

Saiful Amin Ghofur, *Bahaya Akhlak Tercela* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007)

Sayyid Mujtaba Musawi Lari, *Hati: Penyakit dan Pengobatannya*, (Jakarta: IKAPI, 2005)

Siti Mahmuda, *Politik Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahmud MD)* (Jurnal Al-‘Adalah Vol.X,No.4 Oleh UIN Raden Intan Lampung, 20 Juli 2012 ), h.408 (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.id/>, ( 20 Agustus 2019, 20:30), dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1996)

Su’aib H. Muhammad, *Lima Pesan Al-Quran* (Malang-Maliki Press, 2011)

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2011)

T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan: 1974)

Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Social Untuk Kementrian Perdagangan RI*, (Jakarta Pusat; 2014)

Ulaya Abi Ubaid, Sabar dan Syukur Gerbang Kebahagiaan di Dunia dan Ahirat (Jakarta: Amzah, 2012)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Lihat Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016.

Lihat Pasal 53 UU ITE yang menyatakan bahwa semua peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan UU ini dinyatakan tetap berlaku. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 60 UU Penyiaran.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Skripsi**

A.Yudha Pratama, "*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015*", (Lampung : Universitas Lampung, 2016)

Adreanus Sapta Anggara, "*Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*", (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016)

## **D. Internet**

(On-line)<http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> (4 juni 2019)

(On-line)<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html> ( 2 Juni 2019)

(On-line)<http://www.computesta.com/2010/03/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik/#.V-pjsCh95PY> (25 Agustus 2019)

(On-line)<http://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (14 juni 2019)

(On-line)<https://www.kompasiana.com/mrizqihengki/5ccb28703623ae1f0d69e5ea/mengenal-pasal-28-ayat-2-uu-ite?page=all> (12 September 2019).



(On-line)<https://www.scribd.com/dokumen//362441604/sejarah-terbentuknya-UU-ITE> (26 Agustus 2019)

“DalamIslam.com” diakses dari (On-line) <http://dalamislam-com.cdn> pada tanggal (29 Juni 2019)

Muhammad Fikri, “Kisah Yuniar, Terjerat Kasus UU ITE Karena Status “no mention”, tersedia di (On-line) <https://beritagar.id/artikel/berita/kisah-yuniar-terjerat-uu-ite-karena-status-no-mentions> (17 Juli 2019)

Ricky Jordan, “*hoax, hate speech dan badan cyber nasional*” (On-line), tersedia di <http://hmip.fisip.ui.ac.id/hoax-hate-speech-dan-badan-cyber-nasional> (1 Juni 2019)

Roni Pratriadi, “Tentang UU ITE” (On-line), tersedia di <http://undang-undang-ite.blogspot.co.id> (29 mei 2019)

Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespon Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial, dikutip dari (On-line) <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespon-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/> (26 Agustus 2019)

